

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Stunting merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia dalam upaya membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis ini berpotensi menghambat perkembangan fisik dan kognitif, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas hidup jangka Panjang. Stunting, yang dipengaruhi oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, berakibat buruk terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting pada anak usia di bawah lima tahun masih berada pada angka yang signifikan, dari sebesar 30,8% pada tahun 2018, turun menjadi 27,67% pada tahun 2019, dan turun kembali menjadi 24,45 pada tahun 2021, dan tahun 2023 menjadi 21,5% turun 0,01% berdasarkan capaian tahun 2022 sebesar 21,6%, Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, masih terdapat tantangan besar dalam percepatan penurunan angka stunting (Chandra, 2024b, 2024a).

Pada tahun 2018, Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan dan program untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui alokasi anggaran yang lebih besar, namun implementasinya masih menghadapi berbagai masalah. Menurut teori keuangan publik, alokasi dan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif agar sumber daya publik dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat (Musgrave, 1959). Pengelolaan anggaran yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, gizi, dan kesejahteraan sosial benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dalam hal ini adalah penurunan stunting.

Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran untuk sektor kesehatan dan gizi, yang sangat krusial dalam mengatasi stunting, masih menghadapi berbagai kendala. Banyak program yang tidak terintegrasi dengan baik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketidakseimbangan alokasi anggaran antara pusat dan daerah, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan program yang efektif.

Ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran antara pusat dan daerah menjadi tantangan besar, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal, yang diberlakukan di Indonesia sejak reformasi 1998, memberikan kewenangan pengelolaan anggaran kepada pemerintah daerah memiliki potensi untuk meningkatkan responsivitas dan relevansi kebijakan publik terhadap kebutuhan lokal. Akan tetapi, desentralisasi juga membawa tantangan terkait dengan ketidakseimbangan kapasitas antara daerah kaya dan miskin dalam mengelola anggaran secara efisien dan efektif (Faguet, 2014) (UNDP, 2015, 2016). Keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mengurangi angka stunting sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program dengan baik, serta pada dukungan yang memadai dari pemerintah pusat dalam hal pengawasan dan koordinasi.

Di sisi lain, pentingnya evaluasi kinerja dalam pengelolaan anggaran untuk penurunan stunting juga tak dapat dipandang sebelah mata. Program yang dijalankan perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan input yang diberikan, tetapi juga berdasarkan hasil yang dicapai. Evaluasi berbasis hasil memungkinkan pemerintah untuk melihat sejauh mana dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak pada penurunan angka stunting (Mackenzie et al., 2017) (Kemendagri, 2017; Martinez-Vazquez et al., 2017; Suleimenova, 2017). Tanpa evaluasi yang tepat, sulit untuk mengetahui apakah program yang ada berjalan dengan efektif atau tidak, serta bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai hasil yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam periode 2018-2024, khususnya pengelolaan anggaran yang berbasis pada teori keuangan publik, desentralisasi fiskal, dan evaluasi kinerja dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam konteks percepatan penurunan stunting di Indonesia (Bappenas, 2019; OECD, 2019). Penelitian ini akan menganalisis kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penurunan stunting, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi program-program yang ada, agar lebih cepat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi angka stunting di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan teoritik dari keuangan publik, desentralisasi fiskal, dan evaluasi kinerja, penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program penurunan stunting dan memberikan kontribusi bagi kebijakan publik yang lebih baik dalam konteks pencapaian SDGs. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat ditemukan wawasan baru mengenai pentingnya integrasi antara kebijakan fiskal, evaluasi kinerja, dan pengelolaan anggaran dalam mencapai hasil yang optimal dalam penurunan stunting, serta bagaimana desentralisasi fiskal dapat lebih dimanfaatkan untuk mempercepat pencapaian tujuan SDGs yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Hamidi et al., 2021)

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah Berdasarkan Fenomena yang Ada

Stunting, atau gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi salah satu masalah kesehatan yang sangat mendalam dan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi meskipun berbagai program pemerintah telah dijalankan untuk menurunkan angka ini. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penanggulangan stunting di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala besar, baik dari sisi kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun pelaksanaan program di tingkat daerah.

Fenomena yang terjadi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana pengelolaan keuangan publik yang ada dapat mendukung percepatan penurunan stunting. Sebagai contoh, meskipun anggaran untuk sektor kesehatan dan gizi cukup besar, banyak program yang belum mencapai target yang diharapkan, terutama di daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam alokasi dan penggunaan anggaran, serta dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program (Silviana et al., 2023).

Desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah memang dapat meningkatkan responsivitas terhadap masalah lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait dengan kapasitas pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Kapasitas ini, ditambah dengan ketidakseimbangan alokasi dana antara daerah kaya dan daerah miskin, menghambat pencapaian tujuan nasional, termasuk

penurunan stunting (Bardhan, 2002; Gunnar S. Eskeland, 2003; Martinez-Vazquez & McNab, 2003; Smoke, 2000).

Di sisi lain, meskipun evaluasi kinerja program dilakukan, masih terdapat kurangnya indikator yang terukur untuk mengevaluasi dampak penggunaan anggaran terhadap penurunan stunting secara spesifik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem evaluasi yang berbasis hasil yang dapat mengukur efektivitas dan efisiensi program yang berjalan (Arista et al., 2023; Chandra, 2024b, 2024a; Kemenkeu RI, 2024).

1.2.2. Rumusan Masalah Terkait Teori Keuangan Publik

Berdasarkan fenomena yang ada, muncul beberapa masalah utama yang perlu dijawab melalui penelitian ini, terkait dengan pengelolaan anggaran untuk program penurunan stunting, yakni:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran untuk penurunan stunting dalam kerangka teori keuangan publik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana?

Teori keuangan publik mengajukan bahwa pengelolaan anggaran harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mendistribusikan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, anggaran yang dialokasikan untuk penurunan stunting harus dipastikan memberikan dampak yang optimal dalam mengurangi angka stunting. Masalah yang ada adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tepat sasaran dan mendukung pencapaian target nasional.

2. Apakah penggunaan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efektivitas program penurunan stunting di daerah?

Desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah kewenangan dalam mengelola anggaran daerah, tetapi juga membawa tantangan terkait kapasitas pengelolaan anggaran dan alokasi dana yang tidak selalu merata antara daerah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana desentralisasi fiskal dapat berperan dalam mempermudah alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus mengidentifikasi masalah yang timbul akibat ketidakmerataan kapasitas daerah dalam pengelolaan anggaran.

1.2.3. Rumusan Masalah Terkait Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program penurunan stunting berjalan efektif dan efisien. Beberapa masalah utama yang perlu dijawab adalah:

1. Bagaimana evaluasi kinerja dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penggunaan anggaran dalam program penurunan stunting?

Program penurunan stunting harus dievaluasi berdasarkan hasil yang tercapai, bukan hanya berdasarkan input atau anggaran yang dikeluarkan. Evaluasi kinerja berbasis hasil akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai dampak penggunaan anggaran terhadap penurunan angka stunting. Oleh karena itu, rumusan masalah ini akan melihat bagaimana evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan berbasis data untuk memaksimalkan pengaruh anggaran terhadap program tersebut.

2. Apakah indikator kinerja yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menilai dampak program terhadap penurunan stunting?

Penelitian ini akan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem evaluasi yang ada, khususnya dalam hal pengukuran hasil yang terkait dengan pengurangan angka stunting. Hal ini berkaitan dengan pengembangan indikator yang lebih tepat dan terukur dalam mengevaluasi dampak penggunaan anggaran.

1.2.4. Rumusan Masalah Terkait Kebijakan dan pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia telah secara intensif melaksanakan program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada periode 2021–2024 melalui instrumen proteksi sosial seperti PKH dan Kartu Sembako. Sinergi antara program sosial-ekonomi ini dengan intervensi gizi—baik intervensi spesifik maupun sensitif—diselaraskan melalui kebijakan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Intervensi spesifik (sekitar 30 %) menasar ibu hamil dan bayi di 1.000 HPK, sedangkan intervensi sensitif (70 %) mencakup akses pangan bergizi, sanitasi, air bersih, dan edukasi gizi. Berkat upaya terpadu ini, prevalensi stunting turun dari 24,4 % pada 2021 menjadi sekitar 21,6 % di 2022 dan lebih lanjut menurun menjadi 19,8 % pada 2024, sedikit di bawah target pemerintah yang ditetapkan pada 20,1 %. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang perlu dijawab adalah:

1. Bagaimana hubungan antara kebijakan percepatan penurunan kemiskinan (seperti Inpres No. 4 Tahun 2022 dan program-program Bantuan Sosial, PKH, BLT) dengan upaya percepatan penurunan stunting pada periode 2021–2024? Fokus pada sinergi intervensi sosial ekonomi dan intervensi gizi dalam intervensi sensitif dan spesifik.
2. Sejauh mana program percepatan penurunan kemiskinan telah memperkuat akses ibu hamil dan balita terhadap intervensi gizi spesifik (pemberian makanan tambahan, suplemen, imunisasi) yang secara langsung berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting? Apakah kelompok sasaran kemiskinan juga menjadi sasaran utama dalam program intervensi stunting?
3. Apa saja kendala dalam koordinasi lintas sektor (Kemenko PMK, Kemenkes, BKKBN, Kemensos, Pemda) yang mempengaruhi efektivitas intervensi bersinergi antara penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting? Mengacu pada laporan bahwa banyaknya lembaga tanpa pembagian peran jelas atau komitmen politik yang tidak diterjemahkan ke aksi nyata di lapangan.
4. Bagaimana peran kualitas data dan sistem sasaran seperti DTKS dan SSGI dalam menargetkan intervensi kemiskinan dan stunting? Membahas keterkaitan mutu data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk bansos dan SSGI/IKPS survei gizi sebagai dasar pengukuran stunting.
5. Seberapa efektif intervensi gizi sensitif (peningkatan akses pangan bergizi, sanitasi, air bersih) yang didukung anggaran perlindungan sosial maupun stunting dalam mempercepat penurunan stunting di daerah lokus prioritas? Memperhatikan bahwa intervensi semacam air bersih dan sanitasi masuk dalam anggaran stunting secara signifikan dan dianggap faktor kunci.
6. Apa faktor penghambat utama (seperti under-reporting stunting, rendahnya kualitas pelayanan posyandu, insentif kader, compromit politik daerah) yang membuat target penurunan stunting (target nasional 14 % di 2024) tidak tercapai meskipun dukungan program kemiskinan telah ada? Termasuk isu under-reporting dan manipulasi data di tingkat daerah.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan berbagai kendala yang ada dalam dukungan pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan kemiskinan dalam kaitannya pengelolaan anggaran untuk penurunan stunting, serta untuk mengevaluasi apakah ada korelasi positif antara angka kemiskinan dengan capaian percepatan penurunan stunting.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempercepat penurunan stunting dengan menggunakan perspektif keuangan publik, desentralisasi fiskal, evaluasi kinerja, dan penurunan kemiskinan. Berdasarkan fenomena yang ada, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Stunting; Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak desentralisasi fiskal dalam pengelolaan anggaran untuk program penurunan stunting. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam alokasi dan penggunaan anggaran. Namun, ketidakseimbangan kapasitas pengelolaan anggaran antara daerah kaya dan daerah miskin dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana untuk penurunan stunting. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana desentralisasi fiskal dapat berkontribusi atau menghambat pencapaian tujuan penurunan stunting di berbagai daerah.
2. Evaluasi Kinerja Program Penurunan Stunting; Tujuan berikutnya adalah untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap program penurunan stunting yang telah dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini akan menganalisis apakah program yang ada telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam mengurangi angka stunting di Indonesia. Evaluasi ini akan dilakukan berdasarkan indikator output (seperti pencapaian target kegiatan) dan outcome (seperti perubahan nyata dalam angka prevalensi stunting), dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.
3. Menilai Korelasi capaian persentase angka kemiskinan terhadap pencapaian Percepatan Penurunan Stunting (Prevalensi Stunting); Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian persentase angka kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia mendukung program percepatan penurunan stunting.
4. Memberikan Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program; Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta pelaksanaan

program penurunan stunting. Rekomendasi ini akan fokus pada perbaikan pengelolaan anggaran, peningkatan koordinasi antar-sektor, dan optimalisasi penggunaan sumber daya di tingkat daerah agar penurunan stunting dapat tercapai secara lebih cepat dan berkelanjutan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat penurunan stunting dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif di masa depan. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini:

1. Kontribusi terhadap Teori Keuangan Publik dan Desentralisasi Fiskal; Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan publik dan desentralisasi fiskal dengan menambah wawasan mengenai hubungan antara pengelolaan anggaran pemerintah dan pencapaian tujuan pembangunan sosial, khususnya penurunan stunting. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang evaluasi kebijakan publik dalam konteks pengelolaan anggaran dan desentralisasi di negara berkembang.
2. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan; Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam penurunan stunting. Dengan adanya evaluasi terhadap kebijakan yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di sektor kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial.
3. Meningkatkan Koordinasi Antar-Sektor dan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar-sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penurunan stunting. Koordinasi yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan nasional dalam mengurangi stunting, serta menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan efisien.
4. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pemerintah; Dengan fokus pada evaluasi anggaran, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang cara-cara untuk memperbaiki efisiensi penggunaan anggaran untuk penurunan stunting. Efisiensi

dalam pengelolaan anggaran akan meningkatkan dampak dari setiap dana yang dialokasikan dan memastikan bahwa program-program yang ada dapat mencapai hasil yang maksimal.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia sejak tahun 2018 hingga 2024, dengan mempertimbangkan aspek keuangan publik, desentralisasi fiskal, evaluasi kinerja, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Batasan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk memperjelas ruang lingkup analisis yang akan dilakukan, serta memastikan bahwa penelitian ini fokus pada aspek yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian.

1. **Aspek Kebijakan dan Pelaksanaan Program Stunting (2018–2024):** Penelitian ini akan membatasi kajian pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting dalam kurun waktu 2018-2024. Kebijakan yang dianalisis mencakup kebijakan alokasi anggaran, distribusi dana, serta pelaksanaan program-program yang terkait langsung dengan pencegahan dan penurunan stunting, yang diintegrasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan SDGs. Fokus penelitian adalah pada kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran sektoral di bidang kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial, serta keberhasilan dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut.
2. **Keuangan Publik dan Pengelolaan Anggaran:** Penelitian ini akan membatasi fokus pada teori keuangan publik yang mencakup analisis pengalokasian dan penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks program penurunan stunting. Penelitian akan menelaah bagaimana alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan program penurunan stunting sejak 2018 hingga 2024 dikelola, serta sejauh mana prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan diterapkan dalam pengelolaan anggaran.
3. **Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Anggaran Daerah:** Salah satu isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dampak desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan anggaran penurunan stunting. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Namun, perbedaan kapasitas antara daerah kaya dan miskin dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran untuk penurunan stunting.

Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah merespons kebijakan pusat dan bagaimana alokasi dana daerah berdampak pada implementasi program-program stunting.

4. **Evaluasi Kinerja Program Penurunan Stunting:** Evaluasi kinerja program menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membatasi analisis pada evaluasi kinerja program penurunan stunting berdasarkan hasil yang dicapai. Dalam hal ini, evaluasi kinerja tidak hanya mencakup aspek input (alokasi anggaran), tetapi juga output dan outcome yang dicapai oleh program-program terkait stunting di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana evaluasi berbasis hasil dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran serta pencapaian target-target penurunan stunting.
5. **Kaitan Angka Kemiskinan dengan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting:** Penelitian ini akan membatasi pembahasan pada capaian angka kemiskinan dengan capaian percepatan penurunan stunting, dalam hal ini adalah prevalensi stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sejak 2021 sampai dengan tahun 2024 terkait dengan percepatan penurunan kemiskinan dapat mendukung pencapaian target percepatan penurunan stunting, dengan fokus pada alokasi anggaran dan pelaksanaan program yang terintegrasi.
6. **Pencapaian dan Tantangan dalam Penurunan Stunting:** Dalam batasan masalah ini, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai target penurunan stunting yang diinginkan. Penelitian akan mengkaji faktor-faktor seperti ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, keterbatasan dalam pengelolaan anggaran daerah, serta masalah dalam koordinasi antar sektor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan program penurunan stunting.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan berfokus pada pengelolaan anggaran dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penurunan stunting dalam kerangka teori keuangan publik, desentralisasi fiskal, evaluasi kinerja, serta capaian angka persentase kemiskinan. Dengan demikian, batasan masalah ini menetapkan ruang lingkup yang jelas untuk memastikan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang relevan terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, serta pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari tesis ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian ini, serta kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis dari tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai deskripsi variabel penelitian yang digunakan, penentuan sampel dan populasi data yang akan digunakan. Selain itu bab ini juga berisi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang akan digunakan, serta metode analisis yang digunakan dalam tesis ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan mengenai pembahasan dari deskripsi objek penelitian dan hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN

Menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian ini, implikasi manajerial dan implikasi teoritis yang timbul akibat penelitian ini, serta saran-saran bagi penelitian dimasa yang akan datang